

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(PSAP) NO. 07 PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**ADETYA REVI FERDHYAN
NIM : 15622155**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(PSAP) NO. 07 PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

Oleh

**ADETYA REVI FERDHYAN
NIM : 15622155
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTASI ASET TETAP MENURUT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(PSAP) NO. 07 PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

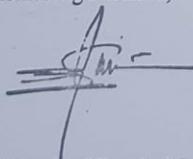
Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : **ADETYA REVI FERDHYAN**
NIM : 15622155

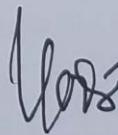
Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Sri Kurnia, SE., Ak., M.Si.CA
NIDN. 1020037101/Lektor

Pembimbing Kedua,



Afriyadi, S.T., ME
NIDN. 1003057101/Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.CA
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(PSAP) NO. 07 PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

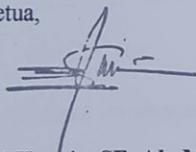
Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : ADETYA REVI FERDHYAN
NIM : 15622155

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun 2020 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

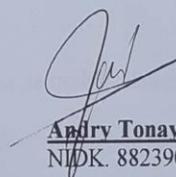
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



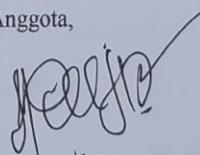
Sri Kurnia, SE., Ak., M.Si.CA
NIDN. 1020037101/Lektor

Sekretaris,



Andry Tonava, S.E., M.Ak
NIDK. 8823900016/Asisten Ahli

Anggota,



Rachmad Chartady, S.E., M.Ak
NIDN. 1021039101/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 28 Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Ketua



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Adetya Revi Ferdhyan
NIM : 15622155
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,40
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) No. 07 Pada Dinas
Pendidikan Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi **dari skripsi ini** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada **paksaan dari** pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 28 Januari 2020

Penyusun,



Adetya Revi Ferdhyan
NIM: 15622155

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil'alamin...

Sujud syukur ku sembahkan kepada Allah SWT. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan sebuah karya untuk orang yang sangat ku cintai dan ku sayangi.

Bapakku Edi Sugiarno dan Ibuku Sri Utami

Terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari saya lahir hingga saya sebesar sekarang ini. Terimakasih juga atas limpahan doa yang tidak berkesudahan, serta segala hal yang telah Bapak dan Ibu lakukan semua yang terbaik.

MOTTO

“Dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, dianggap sedang berjuang
dijalan Allah sampai dia kembali”

HR. Tirmidzi

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. Dengan bermodal yakin
merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup”

“Berdoa, Belajar, Berjuang, Berhasil”

-Penulis-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji serta syukur kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis sangat menyadari dan sangat bersyukur telah mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, dan semangat dari beberapa pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, gagasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.,Ak,CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.,Ak,CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak.,M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu , tak pernah lelah dan selalu sabar dalam memberikan arahan dan bimbingannya hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Ir, Imran Ilyas, MM selaku Plt.Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak.CA selaku Plt. Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Masyitah As Sahara, SE.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PembangunanTanjungpinang.
7. Bapak Afriyadi, ST.,ME selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan.
8. Seluruh Dosen dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang selama ini telah memberikan bekal ilmu selama penulis menuntut ilmu.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Bapak Drs. Atmadinata, M.Pd yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Drs. H. Tamrin Dahlan, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
11. Ibu Lisah, S.E selaku Kasubbag Keuangan, Bapak Siryadi Fatmo, S.IP selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Ibu Ika Saraswati, A.Md, Ibu Fitria Ningsih selaku Pengurus Barang Pengguna, Ibu Veni, Bapak Fitra Surana, dan Staf-staf Pegawai Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas waktu, kesempatan, serta saran yang telah diberikan.
12. Keluargaku, Bapak Edi Sugiarno, Ibu Sri Utami, dan Adikku Raissa Dewi Andini yang selalu mendoakan, menyayangi, dan memberikan dorongan materil dan spiritual kepada penulis hingga akhirnya sampai pada selesainya skripsi ini, rasa sayang dan terimakasih untuk kalian bertiga.

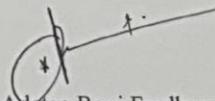
13. Nindi Febriani yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-temanku Rama Alditya, Febri Fitrianiingsih, Yuyun Dwi Agustini, Finanda Riski Desikawati, Wan Rizki Debi Istiawan, Varanditho Ramadhan, Radha Firmandez, Ajeng Sindi Puspita, Putri Armadina yang selalu memberikan semangat.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015, khususnya kelas Malam 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu berbagi keceriaan dan banyak melewati suka duka selama perkuliahan.
16. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat kutuliskan satu persatu-satu, terimakasih atas semuanya.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga amal beliau semua menjadi amal yang baik dan di ridhoi Allah Swt. Amin.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak umum dan bagi mahasiswa pendidikan khususnya.

Tanjungpinang, 28 Januari 2020

Penulis


Adetya Revi Ferdhyan
NIM 15622155

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAAN | iii |
| PERSEMBAHAN..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| ABSTRAK..... | xvi |
| ABSTRACK | xvi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Batasan Masalah | 7 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5. Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.5.1. Kegunaan Ilmiah..... | 8 |
| 1.5.2. Kegunaan Praktis | 8 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 9 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1. Tinjauan Teori..... | 11 |
| 2.1.1. Pengertian Akuntansi | 11 |
| 2.1.2. Akuntansi Sektor Publik | 12 |
| 2.1.2.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik..... | 12 |
| 2.1.2.2. Lingkup Organisasi Sektor Publik..... | 13 |
| 2.1.3. Akuntansi Pemerintahan | 19 |

| | |
|---|----|
| 2.1.3.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan | 19 |
| 2.1.3.2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan | 20 |
| 2.1.3.3. Standar Akuntansi Pemerintahan | 24 |
| 2.1.4. Akuntansi Aset Tetap..... | 24 |
| 2.1.4.1. Pengertian Aset | 24 |
| 2.1.4.2. Pengertian Aset Tetap | 25 |
| 2.1.4.3. Klasifikasi Aset Tetap..... | 26 |
| 2.1.5. Perlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Berbasis AkruaI Terhadap Aset Tetap..... | 28 |
| 2.1.5.1. Pengakuan Aset Tetap..... | 28 |
| 2.1.5.2. Pengukuran Aset Tetap | 29 |
| 2.1.5.3. Penilaian Awal Aset Tetap..... | 30 |
| 2.1.5.4. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap..... | 31 |
| 2.1.5.5. Penyusutan Aset Tetap..... | 31 |
| 2.1.5.6. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap..... | 32 |
| 2.1.5.7. Pengungkapan Aset Tetap..... | 33 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran..... | 34 |
| 2.3. Penelitian Terdahulu | 35 |

BAB III METODELOGI PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| 3.1. Jenis Penelitian | 39 |
| 3.2. Jenis Data dan Sumber Data | 39 |
| 3.2.1. Jenis Data | 39 |
| 3.2.1.1. Data Primer | 39 |
| 3.2.1.2. Data Sekunder | 40 |
| 3.2.2. Sumber Data..... | 40 |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| 3.4. Teknik Analisis Data | 42 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1. Hasil Penelitian | 45 |
| 4.1.1. Sejarah Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang | 45 |

| | | |
|--------|---|----|
| 4.1.2. | Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah | 46 |
| 4.1.3. | Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 46 |
| 4.1.4. | Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang | 46 |
| 4.1.5. | Uraian Tugas | 49 |
| 4.1.6. | Sumber Daya Perangkat Daerah | 65 |
| 4.1.6. | Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang | 68 |
| 4.2. | Hasil Penelitian | 69 |
| 4.2.1. | Pembagian Aset Tetap | 69 |
| 4.2.2. | Pengakuan Akuntansi Aset Tetap | 69 |
| 4.2.3. | Pengukuran Aset Tetap | 72 |
| 4.2.4. | Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap | 75 |
| 4.2.5. | Penyusutan Aset Tetap | 75 |
| 4.2.4. | Penghentian dan Pelepasan Pengakuan Aset Tetap | 76 |
| 4.2.4. | Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan | 76 |
| 4.3. | Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Dengan PSAP No 07 .. | 77 |
| 4.3.1. | Pengakuan Akuntansi Aset Tetap | 77 |
| 4.3.2. | Pengukuran Aset Tetap | 80 |
| 4.3.3. | Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap | 84 |
| 4.3.4. | Penyusutan Aset Tetap | 85 |
| 4.3.5. | Penghentian dan Pelepasan Pengakuan Aset Tetap | 86 |
| 4.3.6. | Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan | 87 |
| 4.4. | Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan PSAP No 07 | 89 |

BAB I KESIMPULAN DAN SARAN

| | | |
|------|------------------|----|
| 5.1. | Kesimpulan | 98 |
| 5.2. | Saran..... | 99 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 4.1. Keadaan Struktural Berdasarkan Golongan..... | 66 |
| Table 4.2. Keadaan Personil Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 66 |
| Table 4.3. Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian..... | 66 |
| Table 4.4. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas Sekolah Negeri | 67 |
| Tabel 4.5. Perbandingan Pembagian Aset Tetap | 69 |
| Table 4.6. Daftar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang..... | 70 |
| Table 4.7. Penyusutan Aset Tetap..... | 75 |
| Table 4.8. Dinas Pendidikan Neraca..... | 76 |
| Table 4.9. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan PSAP No 07..... | 89 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran | 34 |
| Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang | 68 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Inventaris Barang (KIB) A
- Lampiran 2 Kartu Inventaris Barang (KIB) B
- Lampiran 3 Kartu Inventaris Barang (KIB) C
- Lampiran 4 Kartu Inventaris Barang (KIB) D
- Lampiran 5 Laporan Mutasi Aset
- Lampiran 6 Laporan Rekapitulasi Penyusutan
- Lampiran 7 Rekapitulasi Barang Neraca
- Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Lampiran 9 Neraca
- Lampiran 10 Buku Inventaris Ekstra Kompatabel
- Lampiran 11 Plagiarism Checker X Originality Report
- Lampiran 12 Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 13 Surat Izin Penelitian

ABSTRAK

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

Adetya Revi Ferdhyan. 15622155. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. adetyareviferdhyan31@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap atas pengakuan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Pengujian dilakukan dengan menganalisis sejauh mana Dinas Pendidikan telah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan teori, dimana berdasarkan PSAP No. 07 dalam aktivitas Dinas pendidikan Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan secara menyeluruh terhadap kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Dan dibandingkan dengan teori, sehingga didapatkan hasil yang diharapkan. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan pengelola aset serta data sekunder diperoleh dari literatur yang terkait dengan penelitian skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan aset tetap sebagian praktiknya telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PSAP No. 07. Hanya saja, dalam pengakuan aset tetap masih terdapat beberapa aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, penyusutan aset tetap yang telah habis masa manfaatnya tidak dikeluarkan dalam daftar penyusutan serta penghentian dan pelepasan tidak dilakukan sehingga menyebabkan terdapat perbedaan antara nilai yang tersaji dalam neraca dengan keadaan sebenarnya.

Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang lebih menyesuaikan lagi perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 dengan melakukan pengecekan dan evaluasi kinerja secara berkala dan tidak melakukan pergantian pengurus barang setiap tahunnya agar tidak lagi adanya informasi yang hilang antara pengurus barang baru dengan pengurus barang sebelumnya dan tidak terjadi pengakuan aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Kata Kunci : Akuntansi, Aset Tetap, PSAP No 07

Referensi : 25 Buku, 5 Jurnal
Dosen Pembimbing I : Sri Kurnia, S.E.,Ak.,M.Si.,CA
Dosen pembimbing II : Afriyadi, S.E.,M.E

ABSTRACT

Analysis of Accounting Treatment for Fixed Assets According to Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 07 At the City Education Office Tanjungpinang

Adetya Revi Ferdhyan. 15622155. Accounting. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. adetyareviferdhyan31@gmail.com

This study aimed to analyze the accounting treatment of fixed assets for recognition, measurement, expenditure, depreciation, termination and disposal as well as disclosure to the Education Office City Tanjungpinang. Testing is done by analyzing the extent to which the Office of Education have implemented a fixed asset accounting policies are consistent with the theory, which is based on PSAP No. 07 in the Education Office City Tanjungpinang activities.

This study uses qualitative descriptive analysis that describes thoroughly the accounting policies for fixed assets that are applied to the Education Office City Tanjungpinang. And compared with the theory, so we get the expected results. The primary data sources is done by direct interviews with asset management as well as secondary data obtained from the literature associated with to this thesis research.

The results of this study indicate that recognition, measurement, expenditure, depreciation, termination and disposal and disclosure of fixed assets are partly in accordance with the practice most of the rules contained in PSAP No. 07. Only, in the recognition of fixed assets there are still some assets that do not have valid proof of ownership, depreciation of fixed assets that have expired benefits are not issued in the list of depreciation and termination and disposal are not carried out, causing a difference between the value presented in the balance sheet and the circumstances in fact.

So from the results of the research conducted the Education Office City Tanjungpinang should better adjust the accounting treatment of fixed assets based on PSAP No. 07 by periodically checking and evaluating performance and not changing the management of goods every year so that there is no more information lost between the management of new goods with the previous goods manager and there is no recognition of assets that do not have valid proof of ownership

Keywords: Accounting, Fixed Assets, PSAP No. 07

References :25 books, 5 journals
Lecturer I : Sri Kurnia, S.E.,Ak.,M.Si.,CA
lecturer II : Afriyadi, S.E.,M.E

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perusahaan atau sektor privat. Akuntansi sektor publik terdiri dari yaitu akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Dengan adanya tuntutan masyarakat yang terbesar pada saat ini di Indonesia adalah mengenai dengan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik telah mengembangkan akuntansi pemerintahan dengan cukup pesat.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi atau ikut serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Instansi pemerintah dalam menjelaskan tugasnya memerlukan laporan akuntansi, baik sebagai dasar analisis ataupun untuk meningkatkan mutu pengawasan dan pengelolaan keuangan.

Keinginan mewujudkan *good publik governance* semakin terlihat nyata ketika pemerintah melakukan reformasi sektor keuangan yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mana mensyaratkan pemerintah tersebut membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai standar akuntansi pemerintahan yang

berlaku. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, akhirnya terbentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya pada oktober 2010, pemerintah mengesahkan SAP berbasis akrual melalui PP No. 71 Tahun 2010 menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Dengan adanya standar akuntansi yang baru, diharapkan tercipta laporan keuangan yang akuntabel, relevan, dan reliable di sekitar pemerintahan.

Laporan keuangan sektor pemerintahan disusun sesuai dengan status instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Menurut SAP PP No. 71 Tahun 2010 entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan entitas akuntansi hanya diharuskan menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun. Neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu pos/akun penting dalam neraca adalah Aset/Aktiva karena aset dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi di masa depan.

Aset tetap telah menjadi fokus utama akuntansi pemerintahan di Indonesia sejak diwajibkannya penyusunan Laporan Posisi Keuangan sebagai bagian dari

laporan keuangan pemerintah. Nilainya yang signifikan dan kompleksitasnya yang sangat tinggi menjadi penyebab utama perhatian serius akuntansi ditujukan pada pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan dan penyajian aset tetap tersebut.

Dalam SAP, akuntansi aset tetap diatur pada PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Pada paragraf 4 PSAP tersebut, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengklasifikasian aset tetap terdapat pada paragraf 7 yang menyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi. Klasifikasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Kontruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan instansi pemerintah. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan aset tetap merupakan hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut. Maka dapat dikatakan aset tetap menjadi sesuatu yang sangat penting pada sebuah instansi.

Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik, terutama dalam lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam

memanfaatkan aset telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan adanya peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu sistem atau manajemen perlakuan akuntansi aset tetap daerah harus andal.

Aset tetap yang berada dibawah penguasaan suatu instansi harus dicatat secara akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengelolaan aset tetap instansi pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Ruang lingkup untuk pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Baik itu pengakuan, pengukuran atau penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta penyajian atau pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Aset tersebut berupa aset yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Empat belas tahun sejak kewajiban penyusunan Laporan Posisi Keuangan tersebut diberlakukan, yaitu sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntansi aset tetap

dalam laporan keuangan pemerintah masih menunjukkan permasalahan. Setelah pemerintah mengganti regulasi SAP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pun persoalan akuntansi aset tetap masih ada.

Masalah aset tetap merupakan masalah yang selalu terjadi pada pemerintah daerah karena sulitnya melakukan inventarisir aset-aset yang tidak semuanya memiliki dokumen kepemilikan yang sah serta kelemahan sistematis merupakan bawaan dari masa lalu yang memposisikan pengelolaan aset tetap tidak lebih penting dibanding pengelolaan keuangan dan penyebab lainnya karena adanya pola pikir yang lebih sering membeli daripada memelihara. Kondisi ini terjadi bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi masalah kritis.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang yang merupakan suatu instansi yang berperan melaksanakan serta menunjang urusan pendidikan terhadap Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sudah seharusnya menyusun laporan keuangan sebagai entitas Organisasi Perangkat Daerah. Laporan keuangan disusun OPD disusun dengan pedoman SAP seperti yang ditegaskan dalam PP No 71 Tahun 2010. Demikian halnya dengan pengelolaan dan pelaporan aset tetap Dinas Pendidikan, untuk pengelolaan dan kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang harus mengakomodir standar akuntansi. Pentingnya peranan aset tetap dalam menunjang aktivitas operasional Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang bisa dilihat dari total penggunaan aset tetap berdasarkan data laporan keuangan neraca pada tahun 2018 terdiri atas Rp. 47.486.904.280,00. Ditinjau dari nilainya tersebut perolehan aset tetap memerlukan inventarisasi yang signifikan, manajemen aset yang baik, dan

penerapan prosedural yang andal sesuai dengan ketentuan pernyataan akuntansi yang berterima umum yang mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap dalam pelaporan keuangan.

Aset tetap pada Dinas Pendidikan menjadi sangat rumit karena terdapat aset Dinas Pendidikan yang tersebar serta sering terjadinya pergantian pengurus barang pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang yang tidak disertai adanya *transfers of knowledge* yang menyebabkan putusnya informasi antara pengurus barang baru dan pengurus barang sebelumnya sehingga menyebabkan aset-aset tersebut tidak rapi serta tidak informatif dalam pencatatannya juga pada Dinas Pendidikan masih terdapat aset-aset yang seharusnya sudah berpindah kepemilikan tetapi masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Pendidikan.

Aset tetap memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi memang dalam pelaksanaannya bukanlah hal yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan dan persoalan seperti kurang mahirnya sumber daya manusia pengurus barang dan hanya ada satu orang saja pengurus barang dalam Dinas Pendidikan sedangkan aset tetap yang terdapat dalam Dinas Pendidikan Nilainya sangat besar yang menyebabkan tidak efektif pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang?

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian ini membahas tentang kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap klasifikasi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan menurut PSAP No. 07.
2. Pada penelitian ini membahas perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan.
3. Fokus pada penelitian ini ialah data pada tahun 2018.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai bahan referensi penelitian sekaligus dapat pula menggambarkan sejauh mana kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Disamping itu juga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan seluruh pembaca khususnya tentang penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Adapun beberapa kegunaan praktis yang terdapat dalam penelitian ini adalah;

1. Bagi Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang mengenai akuntansi aset tetap. Dimana diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan bidang akuntansi sektor publik. Khususnya mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Selain itu diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama menempuh perkuliahan.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pembaca. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dibidang akuntansi sektor publik.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan permasalahan maupun fenomena yang dimuat kedalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang mendukung permasalahan yang akan diteliti atau yang dianalisis, kerangka penelitian dan juga memuat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai hasil dari analisis data serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accounting*) adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang serta interpretasi dari hasil proses tersebut.

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015:1).

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan (Rudianto, 2012:4).

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis mengolah data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Jusup, 2011:4).

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum (Bahri, 2016:2).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengelompokkan, mengklasifikasikan, mengolah, serta menyajikan data, mencatat

transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan.

2.1.2. Akuntansi Sektor Publik

2.1.2.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik (Mardiasmo, 2018:14).

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta (Bastian, 2010:3).

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama adalah tujuan, sifat, dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonlaba, tidak mencari laba. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya (Renyowijoyo, 2010:2-4).

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak ekonomi tertentu untuk keputusan, yang ditetapkan

pada pengelolaan dana publik dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya (Sujarweni, 2015:1).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi sektor publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan untuk digunakan saat pengambilan keputusan.

2.1.2.2.Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2018:1-2) Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.

Akuntansi sektor publik meliputi pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisai dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin yang lebih dibutuhkan dan substansi keberadaannya.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisai yang berda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang

memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi bagan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen.

Renyowijoyo (2010:3) Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi nonlaba pemerintahan dan organisasi nonlaba nonpemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unuit-unit pemerintah), sedangkan organisasi nonlaba nonpemerintahan meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, serta organisasi-organisasi nonpemerintahan lainnya (yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, dan lain sebagainya).

Bastian (2010:6) lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagi perkembangan pemikiran yang terjadi diatas. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur

dalam kerangka standar akuntansi sektor publik. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberap bidang utama yakni:

- a. Akuntansi Pemerintah Pusat
- b. Akuntansi Pemerintah Daerah
- c. Akuntansi Partai Politik
- d. Akuntansi LSM
- e. Akuntansi Yayasan
- f. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi
- g. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit
- h. Akuntansi Tempat Peribadatan: Masjid, Gereja, Wihara, Pura

Mahmudi (2011:3) Organisasi sektor publik sangat luas cakupannya, bervariasi, dan bergerak dalam lingkungan yang kompleks. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik berikut:

1. Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang *core business*-nya berupa penyediaan barang dan pelayanan publik. Barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua karakteristik yaitu:

- a. Tidak bersaing (*nonrival*) – artinya penggunaanya tidak bersaing. Meskipun semua orang mengkonsumsinya tetapi tidak akan saling mengurangi atau terganggu.
- b. Tidak dapat dikecualikan (*nonexcludable*) – artinya penggunaanya tidak ada pengecualian. Barang tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang dan tidak mungkin dibatasi konsumsinya untuk orang tertentu saja.

Disamping berkecimpung dalam penyediaan barang publik, organisasi sektor publik juga terkait dengan penyediaan pelayanan publik (*public service*). Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori utama, yaitu:

a. Pelayanan Kebutuhan Dasar, meliputi:

- Kesehatan
- Pendidikan dasar
- Bahan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan

b. Pelayanan Umum, meliputi:

- Pelayanan administrasi, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Ijin Usaha. Dan Surat Keterangan Menikah.
- Pelayanan barang, misalnya Barang Konsumsi publik (sembako), Air Bersih, dan Bahan Bakar gas dan minyak.
- Pelayanan Jasa, misalnya:
 - Pendidikan
 - Pemeliharaan kesehatan
 - Jasa listrik dan energy

2. Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara.

Organisasi dapat dikategorikan dalam sektor publik apabila organisasi tersebut berasosiasi dengan pemerintah, terkait dengan penyelenggaraan negara atau keuangan negara. Organisasi sektor publik merupakan bagian dari alat negara untuk melaksanakan konstitusi dan peraturan perundangan yang ditetapkan.

3. Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik publik atau milik negara.

Organisasi sektor publik sangat heterogen. Organisasi yang dapat dikategorikan dalam domain organisasi sektor publik antara lain:

- Pemerintahan, meliputi:
 - Pemerintah pusat dan daerah
 - Kementerian/Lembaga negara
 - Satuan kerja/satua organisasi kementerian
 - Departemen
 - Lembaga Pemerintah Nondepartemen
 - Lembaga Tinggi Negara
 - Badan Layanan Umum
 - Badan Layanan Umum Daerah
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas dan Badan)
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
- Badan Usaha Milik Dearah (BUMD)
- Yayasan milik pemerintah

Sujarweni (2015:3) Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan juga tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang berbentuk pemerintahan dalam suatu negara terdiri dari:

a. Pemerintah Pusat

Termasuk di dalamnya adalah kementerian, misal departemen tenaga kerja, departemen dalam negeri, departemen sosial, departemen keuangan, dan lain-lain. Lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

b. Pemerintah Daerah

Misalnya satuan kerja perangkat daerah seperti dinas perhubungan, dinas kesehatan, dan lain sebagainya.

2) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah terdiri dari:

a. Organisasi nirlaba milik pemerintah, misalnya perguruan tinggi negeri, rumah sakit negeri.

b. Yayasan-yayasan milik pemerintah, misalnya Badan Layanan Umum (BLU dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

3) Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba yang dimiliki oleh swasta misalnya sekolah swasta. Rumah sakit swasta.

2.1.3. Akuntansi Pemerintahan

2.1.3.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2015:18).

Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2010).

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik diperlukan oleh pemerintah maupun badan-badan diluar pemerintah seperti DPR dan sebagainya (Renyowijoyo, 2010:85).

Akuntansi pemerintahan adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (Rachmat, 2010:45).

Akuntansi pemerintahan adalah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Arif, Muchlis, & Iskandar, 2009:12).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses pengelolaan kekayaan daerah yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.1.3.2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang berhubungan dengan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan negara, akuntansi membantu pemerintah berkaitan dengan penggunaan keuangan negara yang pada hakikatnya merupakan uang rakyat. Untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan, salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam menggunakan benda ekonomi adalah dengan mendasarkan semua keputusannya pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pemerintah lebih akurat dalam melaksanakan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahannya, terutama yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Akuntansi menjadi pedoman perhitungan dan penganggaran biaya keperluan pemerintah sejauh mungkin menghindarkan diri dari pengeluaran yang tidak bermanfaat. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintahan secara khusus memiliki tujuan berikut.

Menurut Nordiawan, Putra, & Rahmawati (2009:7) Tujuan akuntansi pemerintahan yaitu:

1. Tanggungjawab

Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisiensi.

Menurut Sujarweni (2015:145) Tujuan akuntansi pemerintah sebagai berikut:

1. Melindungi kekayaan pemerintah dan instansi-instansinya dengan cara pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
2. Memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya tentang keuangan, sebagai dasar penilaian kinerja, dan untuk menentukan ketaatan pada anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.

3. Memberikan informasi keuangan yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah.

Menurut Renyowijoyo (2010:1) Menyatakan bahwa tujuan organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tetap, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Menurut Arif (2009:16) Tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. Akuntabilitas

Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atas manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan anggaran dan strategi pembangunan lain. Selain itu, akuntansi pemerintahan juga dapat digunakan dalam pembukuan pelaksanaan

kegiatan pemerintahan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

3. Pengawasan dan pemeriksaan

Akuntansi pemerintahan juga memungkinkan diadakannya pengawasan pengelolaan keuangan negara oleh para pengawas. Pengawas pengelolaan keuangan negara adalah rakyat yang diwakili dalam lembaga perwakilan, manajemen pemerintah tingkat tinggi dan aparat pengawasan intern pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2018:18) Tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tetap, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan informasi keuangan serta aset pemerintah atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi

keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan.

2.1.3.3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (basis akrual) sebagai pengalihan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (basis kas). SAP disetujui dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai sasaran dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.4. Akuntansi Aset Tetap

2.1.4.1. Pengertian Aset

Aset menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB) adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah lalu.

Aset adalah sumber ekonomi yang dimungkinkan bisa memberikan manfaat atas keuntungan bagi perusahaan dikemudian hari (Nayla, 2013:37).

Aset adalah seluruh sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan biasanya dinyatakan dalam satuan uang (Suradi, 2009:25).

Aset adalah sumber ekonomi yang memiliki manfaat masa depan dan dikendalikan oleh perusahaan yang timbul sebagai akibat dari transaksi masa lalu (Siregar, 2015:223).

Menurut PASP No. 07, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010).

Jadi dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dimasa depan. Sumber ekonomi tersebut adalah semua sumber daya yang dimiliki, baik itu dalam bentuk benda ataupun hak kuasa yang diperoleh dimasa lalu dan dimaksudkan agar memberikan manfaat dikemudian hari.

2.1.4.2.Pengertian Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07, Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PP No 71 tahun 2010).

Aset tetap adalah aset secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang. Aset tetap merupakan aset yang berwujud (Hery, 2014:121).

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Halim, 2012:117).

Aset tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Sebagai contoh, mobil, gedung, mesin pabrik, meja dan kursi, komputer, dan lain sebagainya (Diana & Setiawati, 2011:236).

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Siregar, 2015:223).

Berdasarkan definisi diatas aset pemerintah merupakan aset berwujud yang dapat digunakan lebih dari 12 bulan untuk kegiatan pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Penggunaan aset berwujud oleh masyarakat umum misalnya jalan raya, jembatan, lapangan, dan gedung-gedung yang dapat digunakan rakyat.

2.1.4.3. Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap adalah penggolongan atau pengelompokan untuk masing-masing jenis aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07, berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai

seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 07 Tentang Aset Tetap

2.1.5.1. Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan merupakan suatu proses pencatatan item-item harta, hutang, modal, pendapatan dan biaya, termasuk didalamnya bagaimana menyajikan item tersebut di dalam laporan keuangan. Pengakuan meliputi pengakuan pencatatan untuk pertama kali, pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi atau bahkan mengubah pengakuan yang pertama kali dilakukan.

Pada PSAP No 07 paragraf 15-19 Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak

langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum di dukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2.1.5.2. Pengukuran Aset Tetap

Dalam PSAP No 07 paragraf 20-22 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dan dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.1.5.3. Penilaian Awal Aset Tetap

Dalam PSAP No 07 paragraf 23-27 Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.1.5.4. Pengeluaran Setelah Perolehan

Dalam PSAP No 07 Paragraf 49 Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya dimaksud harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalixation thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam CaLK.

2.1.5.5. Penyusutan

Dalam PSAP No 07 paragraf 53-58 Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

2.1.5.6. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.5.7. Pengungkapan dan Penyajian

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
- (c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

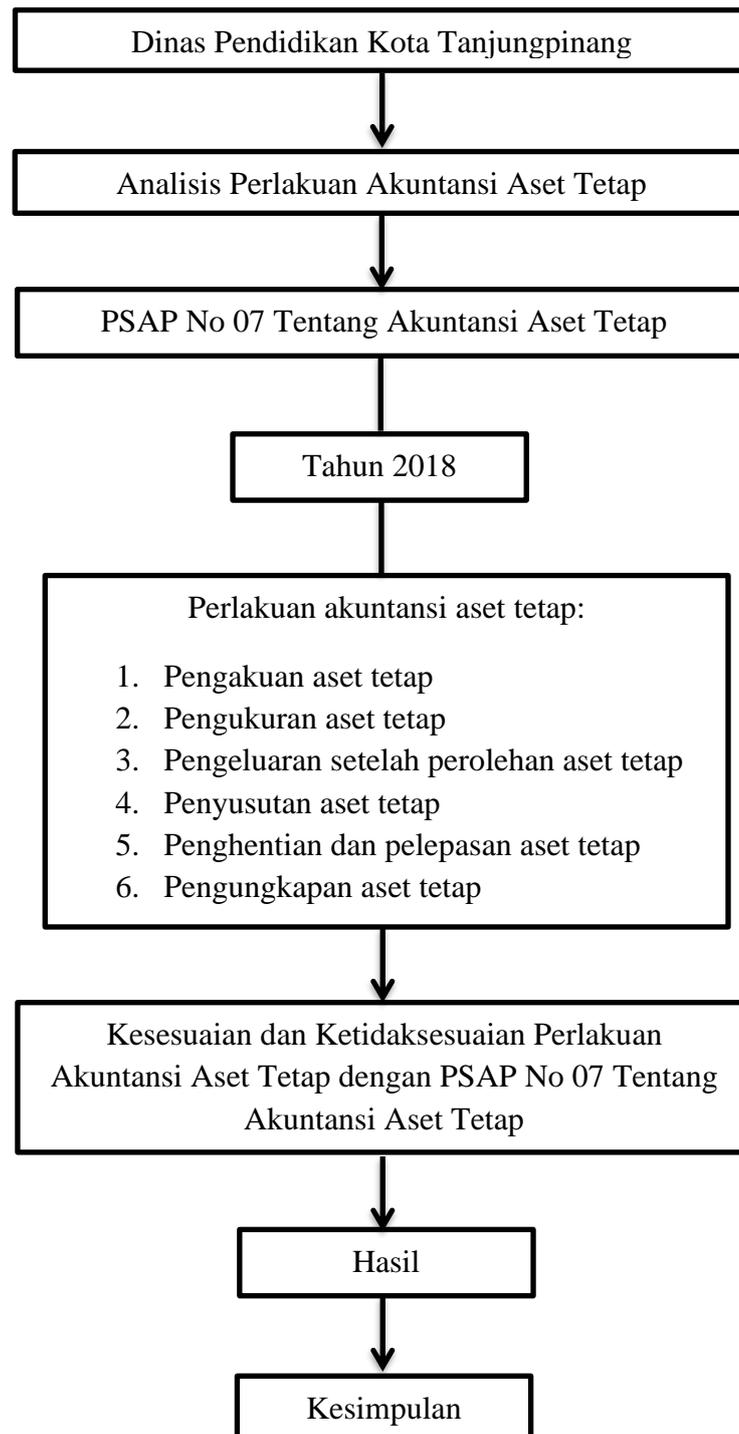
Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

2.1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1.



2.1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan sebagai rujukan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Putri, Sari, & Sulistyowati (2016) Judul penelitian “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal” Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal sebagian tidak berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07. Untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan penghapusan, pengungkapan serta penyusutan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun untuk penilaian aset tetap belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
2. Khafiyya (2017) Judul Penelitian “Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan akuntansi aset tetap pada laporan keuangan (neraca) apa

telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dasar teori yang digunakan ialah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah tentang aset tetap. Metode penelitian bertipe deskriptif komparatif, yaitu menjelaskan bagaimana aset tetap diakui, dinilai, diukur dan diungkapkan dalam laporan keuangan kemudian dibandingkan dengan alat analisis neraca komparatif menurut instansi pemerintahan dan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran aset tetap seperti jeep, speed boat, mesin ketik manual standar dan portable belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07. Aset-aset ini lebih tepat jika diukur penyusutannya menggunakan metode menurun saldo berganda bukan metode garis lurus. Dan pengungkapannya tidak menunjukkan nilai buku sewajarnya.

3. Sita, Irmadariyani, & Adriana (2017) Judul Penelitian “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada responden yaitu kepala bagian akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap penyajian terdapat kesalahan

dalam menyajikan beban penyusutan aset tetap, belum diungkapkannya dasar penilaian aset tetap, belum ditetapkan kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap, pada daftar aset tetap masih terdapat aset tetap yang nilai bukunya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk penggolongan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dan Nomor 08.

4. Duc Binh (2014) Judul penelitian “Sistem Akuntansi Aset Tetap Berwujud untuk Perusahaan di Vietnam” Seiring dengan proses pembangunan ekonomi dan inovasi mendalam dari mekanisme ekonomi, sistem akuntansi di Vietnam secara umum dan rezim akuntansi untuk aset tetap terutama aset tetap tidak berwujud telah terus ditingkatkan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Internasional dalam tren integrasi internasional. Ini telah berkontribusi untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas manajemen keuangan nasional dan manajemen perusahaan. Namun, masih ada beberapa masalah yang menjadi subjek makalah ini yang bertujuan untuk mengevaluasi keterbatasan peraturan akuntansi untuk aset tetap tidak berwujud perusahaan di Vietnam dan memberikan beberapa solusi yang mungkin.
5. Alves & Lopes (2004) Judul penelitian “Penilaian Aset Pemerintah Daerah di Portugal” Pertanyaan-pertanyaan mengenai penjabaran daftar aset Negara, yang terdiri dari barang-barang domain publik dan pribadi, telah menjadi perhatian utama dari badan-badan resmi nasional. Memang, daftar terbaru barang-barang Negara memungkinkan kemungkinan memproduksi,

antara lain, neraca nasional yang komprehensif dari aset dan kewajiban publik. Setelah beberapa upaya gagal sepanjang dekade terakhir, reformasi mendalam dalam administrasi keuangan publik baru-baru ini dilaksanakan di Portugal. Publikasi Rencana Resmi untuk Akuntansi Publik (POCP), yang berasal dari satu untuk tingkat pemerintah daerah, dan Kadaster dan Daftar Barang Negara (CIBE) merupakan langkah mendasar untuk menyusun daftar dan penilaian aset sektor publik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis metodologi yang digunakan dalam penilaian aset Negara di Portugal, dengan fokus khusus pada tingkat pemerintah daerah. Ini dilakukan melalui tinjauan terhadap undang-undang nasional dan literatur internasional yang relevan tentang masalah ini. Selain itu, survei yang dilakukan pada otoritas lokal tertentu untuk memastikan cara mereka menghasilkan neraca juga digunakan dalam analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah pengukuran dalam penjabaran laporan keuangan, dan ada kebutuhan untuk klarifikasi dalam definisi, terutama yang menyangkut perbedaan antara domain publik dan pribadi dari aset negara. Studi ini juga menunjukkan bahwa akun yang lebih baik pada aset Negara, terutama pada stok konstruksi, memiliki implikasi besar untuk manajemen, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melakukan kegiatan penelitian lapangan. Metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan koleratif (Narbuko & Achmadi, 2016:44).

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016:9).

Jenis penelitian ini mengambil suatu objek penelitiannya di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

3.2.1.1.Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kelompok fokus, dan panel, atau juga data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber

(Sujarweni, 2015:89). Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber berupa wawancara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada bagian keuangan pengurus barang serta pihak-pihak yang terkait.

3.2.1.2.Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indrianto & Supomo, 2014:147).

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa laporan administrasi atau dokumen yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset tetap berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), neraca, dokumen yang berkaitan dengan aset tetap Tahun 2018, dan profil Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

3.1.1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Bagian Keuangan: Kartu Inventaris Barang (KIB), neraca, dokumen yang berkaitan dengan aset tetap tahun 2018.
2. Bagian Umum dan Kepegawaian: Profil Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu pusat interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan adalah apabila peneliti atau pewawancara menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku (Yusuf, 2014:377).

Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang sedang diamati. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung baik formal maupun informal dengan pihak Pengurus Barang dan Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

2. Metode Observasi

Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dan dokumen-dokumen tertulis perusahaan (Sugiyono, 2011).

Dokumentasi digunakan untuk menelusuri data-data dokumen terkait dengan pokok penelitian, yang diperoleh dari berbagai instansi yang diambil dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman dan lainnya yang relevan serta berkas-berkas laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang objek yang diteliti.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan di informasikan kepada orang lain. Yang bertujuan untuk menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti (Yusuf, 2014:400-401).

Analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selanjutnya disepanjang melakukan penelitian. Jadi sejak memperoleh data baik dari lapangan maupun hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian.

1. Pengumpulan Data

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti melakukan analisis secara langsung sesuai dengan informasi data yang diperoleh dilapangan.

2. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang terlihat dari catatan-catatan tertulis dilapangan (*written-up field notes*). Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan dan verifikasi dari pengumpulan data

Dengan demikian pekerjaan mengumpulkan data bagi penelitian kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi,

mereduksi dan menyajikan data serta menarik kesimpulan sebagai analisis data kualitatif (Yusuf, 2014:407-409).

Keilmiahan dalam penelitian dengan metode kualitatif sangat diutamakan sehingga demi menjaga keilmiahan data yang diperoleh dalam proses penelitian maka dianggap sangat perlu akan adanya pengecekan kembali atau verifikasi data ulang yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam laporan hasil penelitian.

Data yang dikumpulkan berupa data mengenai objek penelitian untuk memahami latar belakang dan kondisi perlakuan akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, khususnya perlakuan akuntansi aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Alves, J., & Lopes, J. (2004). Valuation of Local Government Assets in Portugal. *Braganca Polytechnic Institute*.
- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: PT INDEKS.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Duc Binh, P. (2014). Tangible Fixed Assets Accounting System for Enterprise in Vietnam. *International Journal of Economics and Finance*, 6(6), 30–37. <https://doi.org/10.5539/ijef.v6n6p30>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hery. (2014). *Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas*. Jakarta: PT Grasindo.
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jusup, H. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Khafiyya, N. A. (2017). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *E-Journal Untag*, 5(3).
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nayla, A. P. (2013). *Dasar-dasar Akuntansi Perkantoran*. Yogyakarta: Laksana.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010*. 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Putri, R. A. F., Sari, Y. P., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Perlakuan

- Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. *Politeknik Negeri Jakarta*, (07), 508–513.
- Rachmat. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi “Konsep & Tehnik Penyusunan”*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sita, S. I., Irmadariyani, R., & Adriana. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Analysis of the Accounting of Fixed Assets In RSUD Genteng). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(1), 40–43.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sujarweni, V. W. (2015). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suradi. (2009). *Akuntansi: Pengantar 1*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Penada Media Group.

CURICULUM VITAE



Nama : Adetya Revi Ferdhyan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Kijang, 31 Juli 1997

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : adetyareviferdhyan31@gmail.com

Alamat : Kp. Sidodadi Ujung, Kijang

Pendidikan : -SD Negeri 007 Bintan Timur
-SMP Negeri 2 Bintan
-SMA Negeri 1 Bintan
-STIE Pembangunan Tanjungpinang